

BAB 3

SISTEM EKONOMI SOSIALIS

Tujuan pembelajaran:

1. Mengetahui dan memahami konsep sistem ekonomi sosialis
2. Menjelaskan karakteristik sistem ekonomi sosialis
3. Menjelaskan bagaimana sistem ekonomi sosialis mengkritik sistem ekonomi kapitalis
4. Menjelaskan bagaimana Islam mengkritik konsep pemikiran sistem ekonomi sosialis

A. Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi merupakan sebuah skema yang digunakan suatu negara tertentu di dalam memecahkan persoalan-persoalan ekonomi yang dialami oleh negara tersebut, agar persoalan ekonomi itu dapat teratasi, jangan sampai dengan adanya sistem ekonomi justru menambah masalah atau persoalan ekonomi suatu negara, walaupun jika ditinjau, sampai saat ini belum ada sistem ekonomi yang sempurna yang mampu menyelesaikan persoalan bangsa khususnya dalam hal keadilan dan pemerataan bagi masyarakatnya yang ada. Secara garis besar sistem ekonomi di dunia di dominasi oleh dua sistem, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Philips, R. J. (1986) mengemukakan Sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Filosofi ekonomi sosialis adalah bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Ciri-ciri ekonomi sosialis diantaranya: kepemilikan harta oleh negara, kesamaan ekonomi, dan disiplin politik.

Munculnya sistem sosialis boleh jadi sebagai bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituduh sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata, karena telah menyerahkan sepenuhnya siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah mempunyai andil besar dalam

mengatur roda perekonomian di sebuah negara. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat (Lima de Miranda, K., & Snower, D. J. 2020).

Masyarakat sosialis pertama muncul pada tahun 1917, ketika Rusia diguncang Revolusi Bolshevik dan menjadi Uni Soviet. Masyarakat masyarakat lain yang lahir setelah itu antara lain, Yugoslavia akibat revolusi pada tahun 1945. Dan diantara tahun 1945 sampai 1948 ada Polandia, Jerman Timur, Cekoslovakia, Hongaria, Rumania, dan Bulgaria berubah menjadi masyarakat sosialis melalui pendudukan militer Soviet. Masyarakat-masyarakat ini mungkin paling tepat disebut sebagai negara sosialis karena peran kuat pemerintah dalam mengatur sector ekonomi. Contoh klasiknya di Uni Soviet, pemilikan pribadi hampir ditiadakan, kecuali barang-barang konsumsi. Jadi seseorang hanya dapat memiliki satu rumah, satu mobil, atau lemari pakaian pribadi, akan tetapi seseorang tidak diperbolehkan memiliki sarana produksi secara perseorangan.

Dasar filosofis dan ideologis sistem ini berangkat dari ideologi komunisme yang sering di sebut juga “marxisme”. Sedangkan aliran sosialisme sebelum marx sering dimaksudkan ke dalam “sosialis” (Guins, G. C. 2012). Dalam kehidupan sehari-hari, kata sosialisme sering dipakai bergantian dengan istilah komunisme. Karena antara sosialisme dan komunisme memang tidak banyak perbedaan. Menurut Briton, sosialisme menggambarkan pergeseran milik kekayaan dari swasta ke pemerintah yang berlangsung secara perlahan-lahan melalui prosedur peraturan pemerintah dengan memberikan kompensasi pada pemilik-pemilik swasta. Sementara itu dalam komunisme, peralihan pemilikan dari swasta ke pemerintah tersebut digambarkan secara cepat dan revolusioner, dilakukan secara paksa dan tanpa kompensasi. Jadi, walaupun tujuan sosialisme dengan komunisme sama, cara untuk mencapai tujuan ini sangat berbeda.

Geoffrey, B. (2020) mengemukakan Sistem Ekonomi Sosialis dilandasi oleh falsafah kolektivisme dan organisme. Kolektivisme adalah ajaran yang menyatakan bahwa setiap orang adalah warga masyarakat. Oleh karena masyarakat adalah sebuah kesatuan tersendiri maka kepentingan masyarakat harus lebih dahulu diutamakan daripada kepentingan pribadi. Organisme adalah pandangan bahwa selain kepentingan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah sebagai sebuah kesatuan juga memiliki kepentingan dan kebutuhan. Oleh karena itu, Arganni, E. (2020) berpendapat pemerintah sebaiknya berperan besar dalam sistem ekonomi untuk menjamin pemenuhan kepentingan dan kebutuhan setiap warga negara.

B. Teori Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis, yang mana menyerahkan segala siklus ekonomi sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang ada. Sedangkan untuk sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah sangat memiliki peran sangat besar di dalam mengelola roda perekonomian dari hulu hingga hilir dalam rantai perekonomian di masyarakat (Schumpeter, J. A. 2013). Sistem ekonomi sosialis bukan berarti tidak memberikan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, individu tetap diberikan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi tetapi sangat terbatas sekali, serta dengan adanya campur tangan pemerintah yang sangat besar. Pemerintah melakukan campur tangan demi terwujudnya kemakmuran masyarakat bersama, tetapi di sisi lain kepemilikan individu yang dibatasi menyebabkan kreativitas individu menurun karena semangat untuk berkarya di bayangbayangi oleh pemerintah untuk kemakmuran bersama.

Sosialis sebagai sistem ekonomi sebenarnya merupakan antithesis Kapitalisme (Lange, O. 1937). Sesuai dengan namanya, sistem ekonomi Sosialis adalah sistem pengaturan ekonomi yang berkaitan dengan harta

benda, industri dan perusahaan secara kolektif yang dikuasai oleh negara. Adler, P. S. (2019) mengemukakan dalam buku yang berjudul *The 99 percent economy: How democratic socialism can overcome the crises of capitalism*. sistem sosialisme tersebut diasaskan kepada prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut:

1) Mewujudkan Kesetaraan (*Equality*)

Bentuk kesetaraan (*equality*) yang ingin diwujudkan sampai saat ini masih diperselisihkan oleh kaum Sosialis. Ada yang menyebutnya dengan Kesetaraan Aritmetik, yaitu kesetaraan dalam segala hal yang bisa dimanfaatkan, di mana setiap individu diberikan sesuatu yang sama dengan individu yang lain. Kelompok lain menyebutnya dengan Kesetaraan Sosial, yaitu pembagian hasil kerja yang dilakukan sesuai dengan keperluan masing-masing, dan pembagian kerja sesuai dengan kemampuan. Kesetaraan ini dapat diwujudkan bila konsep ini diterapkan: Masing-masing (akan diberikan pekerjaan) sesuai dengan kemampuannya, dan masing-masing mendapatkan sesuatu sesuai dengan keperluannya. Ada yang menyatakan, bahwa kesetaraan tersebut tentunya dilihat sesuai dengan alat-alat distribusi dengan konsep: Masing-masing sesuai dengan kemampuannya atau kesanggupannya, dan masing-masing sesuai dengan aktivitasnya. Kesetaraan tersebut benar-benar akan terwujud kalau setiap orang dibekali dengan alat-alat distribusi yang sama dengan orang lain.

2) Menghapuskan Kepemilikan Individu

Dalam konteks penghapusan kepemilikan individu (*private ownership*) juga terdiri dari beberapa mazhab. Mazhab Komunisme berpendapat bahwa kepemilikan individu harus dihilangkan sama sekali. Mazhab Sosialisme Kapital berpendapat, bahwa kepemilikan individu yang berkaitan dengan barang-barang modal atau alat-alat distribusi, itulah yang dihapus, seperti tanah, industri, rel kereta api, jalan raya, tambang dan sebagainya. Ada yang menghilangkan kepemilikan yang berkaitan dengan

tanah pertanian saja. Mazhab ini disebut Sosialisme Pertanian. Ada juga yang mengatakan: "Hendaklah dikaji setiap situasi bila ada kemaslahatan umum yang mengupayakan perubahan status milik pribadi menjadi milik umum, termasuk menentukan aktivitas para pemilik dalam berbagai situasi, agar para penguasa membuat kebijakan yang tertinggi dalam hal sewa dan ketentuan terendah untuk upah sementara para pekerja dibebaskan mendapatkan modal dan sebagainya." Ini biasanya disebut mazhab Sosialisme Negara.

3) Mengatur Produksi dan Distribusi Secara Kolektif

Pengaturan tentang produksi dan distribusi dalam sistem ekonomi Sosialis terdiri dari beberapa pendapat. Mazhab Guild Socialism menyatakan, bahwa pengaturan tentang produksi dan distribusi diwujudkan dengan bekerja, yaitu tenaga kaum buruh itu sendiri, yang antara lain dilakukan dengan merusak alat-alat produksi, menyebarkan ide vandalis kepada kaum buruh, serta upaya merealisasikannya. Sosialisme Marxisme menyebut proses tersebut sebagai hukum perubahan dalam masyarakat, atau yang disebut dengan metode Kontradiksi. Adapun Sosialisme Negara menyatakan perlunya kajian terhadap semua keadaan yang memungkinkan terjadinya perubahan kepemilikan individu (*private ownership*) menjadi milik umum (*public ownership*), yang biasanya dikenali dengan istilah *Nationalization*.

Karena sistem ekonomi sosialis ini memiliki pandangan bahwa suatu kemakmuran pribadi atau individu hanya dapat terwujud jika berlandaskan kemakmuran secara bersama-sama. Sehingga konsekuensi yang harus dipertaruhkan ialah penguasaan dan kepemilikan atas aset-aset ekonomi maupun terhadap faktor-faktor produksi yang ada sebagian besarnya adalah kepemilikan untuk sosial.

4) Teori Nilai lebih Tenaga Kerja (*Surplus Labor And Value Theory*)

Karl Marx memulainya dengan mengkritisi kembali teori dari Adam Smith. Theory ini membahas tentang nilai (value) dari suatu barang, nilai dari suatu barang menurut Smith dan Ricardo diukur dari seberapa banyak tenaga yang telah dikorbankan oleh pekerja untuk memproduksi barang tersebut. Dalam pandangan terhadap nilai suatu barang, Karl Marx membagi dua kelompok besar, yaitu kelompok yang pola produksi yang masih tradisional dan kelompok modern, yang sudah menggunakan perusahaan model PT. Dalam pola tradisional, mulai dari pemilik, yang memasarkan masih bersifat individual. Maka keuntungannya akan individual juga. Dalam pola produksi modern, pola produksinya sudah bersifat kolektif, artinya yang memproduksi barang sampai pada proses pemasarannya, semuanya dilakukan secara kolektif oleh buruh-buruh perusahaan.

Teori ekonomi kapitalisme untuk memperoleh keuntungan maksimum, maka salah satu metodenya adalah dengan cara menekan biaya produksi seminimum mungkin (Harrison, J. S., & Wicks, A. C. 2013). Pada kenyataannya tenaga para buruh hanya dianggap sebagai bagian dari komponen biaya produksi, kalau ini terjadi bisa jadi upah buruh sangat ditekan. Sementara itu, kenyataannya para buruh hanya dianggap sebagai bagian dari komponen produksi. Sebagaimana teori nilai dikemukakan oleh Smith dan Ricardo, jika nilai barang diukur dari besarnya tenaga kerja yang dikorbankan, maka sesungguhnya telah terjadi surplus nilai tenaga buruh yang telah diambil oleh majikannya. Sebab, dalam proses produksi tersebut, pada kenyataannya para majikannya tidak ikut terlibat sama sekali. Semua melakukan proses produksi dengan buruhnya. Namun keuntungan bersih diambil majikannya.

5) Teori Nilai (Value)

Pada dasarnya teori ini diambil dari para ahli ekonomi kapitalis, kemudian Marx menggunakan teori tersebut untuk menyerang balik mereka.

Setelah Adam Smith, ada David Ricardho yang mencoba menjelaskan teori usaha tersebut. Dalam mendefinisikan nilai, dia mengatakan :

“yang menentukan nilai barang itu bukan semata-mata kadar usaha yang secara langsung dikorbankan untuk menghasilkannya, tetapi juga pada usaha yang telah dikorbankan sebelumnya untuk menghasilkan alat-alat dan perlengkapan-perengkapan yang dipergunakan dalam proses produksi”

Dengan kata lain, Ricardo meyakini bahwa nilai suatu barang sangat bergantung pada biaya produksinya. Biaya ini dapat dikembalikan pada satu unsur, yaitu usaha. Lalu datanglah Karl Marx mengambil teori Ricardo ini, yaitu teori tentang nilai menurut sistem ekonomi kapitalis-sebagai senjata untuk menyerang konsep kepemilikan individu, sekaligus menyerang konsep kepemilikan individu, sekaligus menyerang sistem ekonomi kapitalis secara umum. Dia mengatakan, bahwa sumber satu-satunya bagi nilai adalah usaha yang dikorbankan untuk memproduksi suatu barang, dan bahwa para pemilik modal dalam sistem kapitalis telah membeli tenaga pekerja dengan upah yang tidak lebih dari sekedar mempertahankan hidupnya agar bisa bekerja, kemudian pekerja tersebut mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan barang-barang yang nilainya jauh melebihi upah yang diberikan kepada pekerja tersebut.

Karl Marx menyebut perbedaan antara yang dihasilkan oleh pekerja dan upah riil yang diberikan, kepada pekerja tersebut dengan “nilai lebih” (surplus value). Dia menegaskan bahwa “nilai lebih” ini tercermin dari apa yang “dirampas” oleh pemilik modal dan para majikan terhadap hak-hak para pekerja, yang disebut dengan sebutan pendapatan, laba dan manfaat modal (capital utility) yang secara pasti sebelumnya sama sekali belum pernah diakui dalam proyek-proyek mereka. Karl Marx berpendapat bahwa aliran-aliran sosialisme yang ada sebelumnya, dalam memenangkan pikirannya, biasa hanya bersandar pada fitrah yang dimiliki oleh manusia, yaitu kecintaan manusia pada keadilan dan keberpihakannya yang dizalimi.

Aliran-aliran sosialisme kemudian membuat mekanisme baru yang mereka yakini mampu diterapkan di tengah-tengah masyarakat.

6) Teori Tentang Perkembangan Sejarah Kemanusiaan

Sistem masyarakat yang ada pada masa kapan pun sebenarnya merupakan akibat dari kondisi ekonomi. Perubahan-perubahan yang dialami sistem tersebut semata-mata bisa dikembalikan pada satu sebab, yaitu perjuangan kelas (*class struggle*) dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi. Sejak revolusi Prancis, perjuangan kelas terjadi antara kelas menengah (*kaum borjuis*) dan kelas pekerja (*proletar*). Kelompok pertama, adalah pengendali proyek-proyek ekonomi yang pemiliknya adalah para pemilik modal, yang menjadi kelompok dzolim. Jumlah mereka lebih banyak dari kaum borjuis, lalu terjadilah konflik kepentingan diantara dua kelompok ini.

Hal ini terjadi karena sistem produksi saat ini tidak lagi berjalan sesuai dengan sistem kepemilikan. Rychlak, J. F. (1984) mengemukakan produksi tidak mungkin berjalan sendirian. Artinya, seseorang tidak bisa memproduksi secara individual, seperti pernah terjadi pada zaman dulu, tetapi juga harus kolektif; masing-masing individu bekerja secara bekerja sama. Akibatnya, kelas pekerja (*proletar*) padahal mereka ikut terlibat dalam memproduksi tidak bisa ikut memiliki modal dan tetap saja di bawah belas kasih para pemilik modal. Padahal pemilik modal secara langsung tidak melibatkan diri dalam memproduksi.

Pada saat yang sama, mereka selalu mengeksploitasi para pekerja. Mereka tidak akan memberikan upah kepada para pekerja tersebut kecuali pas-pasan. Seorang pekerja dipaksa untuk menerima upah yang pas-pasan tersebut karena dia tidak memiliki apapun kecuali jerih payah yang dilakukannya. Perbedaan nilai orang yang memproduksi dengan upah pekerja-disebut karl marx dengan sebutan “nilai lebih” (*surplus value*) itulah yang membentuk laba.. laba inilah yang dimonopoli para kapitalis.

Padahal dalam prespektif keadilan, laba tersebut merupakan bagian (hak) seorang pekerja (surplus labour).

Pertentangan itu akan tetap terjadi diantara dua kelas sampai sistem kepemilikan dengan sistem produksi berjalan beriringan, yakni sampai kepemilikan itu menjadi kepemilikan bersama (kolektif) (Ollman, B., & Bertell, O. 1976). Kepemilikan ini akan berakhir dengan kemenangan di pihak kelas pekerja (proletar) karena mengikuti hukum perkembangan sosial. Sebab, kelas pekerja adalah kelas yang paling buruk kondisinya dan paling banyak jumlahnya. Adapun bagaimana kelas pekerja (proletar) ini mendapat kemenangan, termasuk apa sebab-penyebabnya itulah yang dikatakan perkembangan sosial. Dalam buku karl marx das capital “sentralisasi alat-alat produksi dan sosialisasi tenaga kerja pada akhirnya mencapai titik dimana mereka menajdi tidak kompitibel dengan bengkarak kapitalis mereka. Sehingga berngkarak itu terpecah belah, lonceng kepemilikan pribadi kapitalis berbunyi. Kaum perampas kini dirampas.

Itulah yang ditentukan oleh hukum sentralisasi modal (*the law of capital centralization*) dan praktik persaingan bebas (*free market*). Dengan berlakunya hukum ini, jumlah pemilik modal (borjuis) menjadi berkurang, sementara jumlah pekerja (*proletar*) terus bertambah.

7) Tokoh –Tokoh Pendiri Sistem Ekonomi Sosialis

a. Robert Owen (1881 – 1858)

Berasal dari Inggris, merupakan tokoh pertama yang mengembangkan benihbenih pemikiran sosialisme. Semasa hidupnya, Owen selalu memperhatikan nasib orang kecil/ buruh pabrik. Pemikirannya tentang sosialisme dituangkan dalam buku berjudul “A View of Society, an Essay on the Formation of human Character”. Dalam bukunya tersebut, ia menyatakan bahwa lingkungan sosialberpengaruh pada pembentukan karakter manusia. Ia berusaha mencari caranya dengan meningkatkan kesejahteraan pekerjanya.

b. Karl Marx (1818 – 1883)

Lahir di Trier, Jerman 5 Mei 1818. Berasal dari keluarga Yahudi kelas menengah, Marx kuliah ilmu hukum di universitas Bonn. Setahun kemudian pindah ke universitas Berlin untuk belajar filsafat. Pada usia 23 tahun ia meraih gelar doktor filsafat. Gagal menjadi dosen, Marx muda kemudian menjadi wartawan dan akhirnya lebih banyak menjadi aktivis politik dan penulis. Marx mengkritik sistem kapitalisme sebagai sistem yang mengalienasi manusia dan karyanya. Hasil karya seseorang tidak lagi menjadi miliknya melainkan milik pemilik modal yang membiayai dia untuk mengerjakannya. Dengan teori tentang materialisme sejarah Marx berkeyakinan bahwa sistem kapitalis akan termakan oleh perkembangan sejarah, dan sejarah akan melahirkan revolusi yang menghancurkan kapitalisme dan akan terlahir masyarakat tanpa kelas, tanpa negara. Dengan teorinya mengenai akumulasi modal, dia pun meramalkan bahwa dalam kapitalisme, modal akan perlahan-lahan terakumulasi pada pemilik modal tertentu akibat persaingan, maka akan tiba saatnya produksi berhenti dan akan terjadi revolusi, saat sistem kapitalisme mandek dan tidak bisa lagi berjalan.

c. Saint Simon (1886)

Claude Henri de Rouvroy Comte de Saint Simon. Lebih dikenal Henri de Saint Simon. Lahir 17 Oktober 1760 di Paris, Prancis, daerah pinggiran miskin namun dari keluarga terkemuka. Ayahnya putra kedua LouisFrancois de St. Simon seorang tentara. Saint Simon dididik secara privat oleh para tutor pribadinya, dan belajar otodidak. Usia 17 tahun ikut pendidikan militer kemudian bertugas koloni Perancis di Amerika, sebagai kapten artileri di Yorktown tahun 1781. Dipandang sebagai bapak sosialisme karena dialah orang pertama yang menyerukan perlunya sarana-sarana produksi dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah/negara.

8) Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis

Adler, P. S. (2019) mengemukakan ciri- ciri sistem ekonomi sosialis terdiri dari tiga bagian;

- a. Lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas.
- b. Pemerintah memiliki peran sangat besar
- c. Sifat manusia dalam sistem ini ditentukan oleh pola produksi Hak milik individu tidak diakui Prinsip dasar sistem ekonomi sosialis

Menurut Guins, G. C. (2012) ciri-ciri ekonomi sosialis adalah sebagai berikut:

- a. Pemilikan harta oleh negara seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan.
- b. Kesamaan ekonomi sistem ekonomi sosialis menyatakan, (walaupun sulit ditemui disemua negara komunis) bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing.
- c. Keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi.

9) Kelebihan sistem ekonomi sosialis

- a. Semua kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah, sehingga pemerintah mudah melakukan control atau pengawasan.
- b. Tidak ada kesenjangan ekonomi yang mencolok di antara anggota masyarakat.
- c. Pemerintah mudah dalam mengatur dan melakukan pembentukan harga pasar atas barang dan jasa.

10) Kelemahan sistem ekonomi sosialis

- a. Tawar menawar sangat sulit dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak dua kali sehari.
- b. Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menghambtanya dalam memperoleh kebebasan berfikir serta bertindak. Ini menunjukkan secara tidak langsung sistem ini terikat kepada sistem ekonomi diktator. Buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin.
- c. Dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi., sementara pendidikan moral individu di abaikan. Dengan demikian apabila pencapaian kepuasan kebendaan menjadi tujuan utama dan nilai-nilai moral tidak diperhatikan lagi, maka tidak dapat dihindarkan bahwa masyarakat akan terbagi dalam beberapa kelompok. Seluruh kekuasaan akan berada di tangan golongan kaum buruh (proletariat) yang kurang berpendidikan dan beradab, kezaliman, penindasan dan balas dendam, menjadi lebih berbahaya dari pada sistem ekonomi kapitalis.
- d. Sistem ekonomi sosialis mencoba untuk mencapai tujuan melalui larangan-larangan eksternal dan mengesampingkan pendidikan moral dan latihan individu. Dengan demikian jelas mereka tidak berusaha untuk mencapai kejayaan yang menjadi tujuannya.

C. Kritik Sosialisme Terhadap Kapitalisme

Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada sistem dan ideologi kapitalis, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan persaingan pasar, yang dikendalikan oleh produksi, distribusi dan konsumsi (Redding, G. 2005). Kritik yang akan disampaikan menyangkut pandangan tentang dasar-dasar sistem ekonomi kapitalis antara lain mencakup:

1) Kritik Terhadap Kelangkaan sebagai Problematika Ekonomi.

Pandangan sistem kapitalis yang menyamakan antara pengertian kebutuhan (need) dengan keinginan (want) adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta. Keinginan (want) manusia memang tidak terbatas dan cenderung untuk terus bertambah dari waktu ke waktu (Milanovic, B. 2019). Sementara kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan pokok dan kebutuhan yang sifatnya pelengkap, yaitu kebutuhan sekunder dan tersier. Kebutuhan pokok manusia berupa pangan, sandang dan papan dalam kenyataannya bersifat terbatas. Setiap orang yang telah kenyang makan makanan tertentu maka pada saat itu sebenarnya dia tidak membutuhkan lainnya. Demikian juga dengan kebutuhan sandang dan papan. Dan jika manusia sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya maka sebenarnya dia sudah dapat menjalani kehidupan ini tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Adapun kebutuhan manusia yang sifatnya pelengkap (sekunder dan tersier), memang pada kenyataannya selalu berkembang terus bertambah seiring dengan tingkat kesejahteraan individunya. Namun perlu ditekankan di sini bahwa jika seorang individu atau suatu masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pelengkapya, namun kebutuhan pokoknya terpenuhi, maka individu atau masyarakat tersebut tetap dapat menjalani kehidupannya tanpa kesulitan berarti.

Sedangkan keinginan manusia memang tidak terbatas. Sebagai contoh seseorang yang sudah makan kenyang, kebutuhan akan makanan sudah terpenuhi tentunya ia dapat saja menginginkan makanan lainnya sebagai variasi dari makanannya. Oleh karena itu sebenarnya kebutuhan pokok manusia sifatnya terbatas adapun keinginan manusia memang tidak pernah akan habis selama ia masih hidup. Sehingga pandangan kapitalis yang menyamakan antara kebutuhan dan keinginan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kekeliruan lainnya adalah pandangan para ahli ekonomi kapitalis yang menyatakan bahwa kebutuhan terbatas pada kebutuhan materi saja. Pandangan ini salah dan sangat bertentangan

dengan fakta. Selain mempunyai kebutuhan materi, manusia mempunyai kebutuhan non materi. Dalam hal ini ternyata para ekonom kapitalis tidak mengenal kebutuhan-kebutuhan itu sehingga mereka dipenuhi oleh kekeringan nilai agama, moral, dan nilai kemanusiaan.

Demikian pula pandangan ahli ekonomi kapitalis (dalam Milanovic, B. 2019) yang memandang bahwa kebutuhan dan manfaat suatu materi sebagaimana adanya, tanpa memperhatikan apakah itu dapat mensejahterakan masyarakat, adalah tidak tepat. Sebab menentukan suatu kebutuhan berdasarkan keinginan manusia semata sangatlah tidak tepat. Masyarakat kapitalis harus menerima kebutuhan sebagian dari mereka terhadap narkoba, obat-obat terlarang, perjudian, pelacuran. Karena faktanya ada di antara mereka yang menginginkannya, meskipun berbahaya. Konsep yang demikian tentulah akan menghancurkan masyarakat itu sendiri. Kebutuhan yang aneh itu akan meruntuhkan tatanan masyarakat mereka sekalipun konsumen kebutuhan tadi hanya segelintir orang.

Kekeliruan lain yang dapat kita paparkan adalah ketika para ahli ekonomi kapitalis menganggap bahwa barang dan jasa yang diproduksi hanya semata-mata untuk dimanfaatkan menjadi alat tukarmenukar sesama manusia. Padahal sebenarnya ketika barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dijadikan sebagai alat untuk tukarmenukar, maka pada saat itulah barang dan jasa tersebut sangat menentukan bentuk dan corak interaksi antar anggota masyarakat. Oleh karena itu agar interaksi di antara anggota masyarakat dapat berjalan secara aman, mendatangkan ketenteraman, kebahagiaan dan kesejahteraan, maka harus ada perhatian terhadap sesuatu yang harus dijadikan pijakan oleh masyarakat. Dengan kata lain harus ada kesepakatan bersama tentang mana yang pada hakikatnya bermanfaat bagi masyarakat serta mana yang pada hakikatnya membahayakan masyarakat.

Kita semestinya tidak boleh mengklaim bahwa barang dan jasa tertentu bermanfaat hanya karena sekelompok orang menginginkannya tanpa melihat esensi apakah barang dan jasa tersebut berbahaya atau tidak. Berdasarkan hal ini, maka narkoba, prostitusi dan sejenisnya tidak boleh dianggap sebagai barang dan jasa yang bermanfaat, atau menganggapnya sebagai barang dan jasa yang produktif, semata karena ada orang yang menginginkannya. Ketika melihat manfaat barang dan jasa, kita harus melihat pengaruh barang dan jasa produktif tersebut terhadap hubungan masyarakat. inilah penjelasan tentang kekeliruan ekonom kapitalis dalam memandang kebutuhan manusia yang dianggapnya tidak terbatas.

Adapun kekeliruan lain yang dilakukan para ekonom kapitalis adalah ketika mereka memandang bahwa problematika ekonomi terjadi karena adanya kelangkaan (scarcity). Bahwa akibat terbatasnya barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas, telah menyebabkan pandangan para ekonom kapitalis tersebut dibangun dengan berpijak pada distribusi kekayaan dengan porsi yang jauh lebih besar daripada distribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab menurut mereka masalah kelangkaan hanya dapat diselesaikan dengan jalan produksi setinggi-setingginya. Bahkan pandangan terhadap masalah distribusi tersebut menjadi sebuah pandangan yang tidak utuh. Atas dasar inilah, maka sistem ekonomi kapitalis hanya mengarah kepada satu tujuan, yaitu meningkatkan kekayaan negara secara total. Kemudian berusaha memperoleh tingkat produksi setinggi-tingginya. Dan terealisasinya kemakmuran anggota masyarakat setinggi mungkin sebagai akibat adanya penambahan pendapatan nasional (national income), dan naiknya produksi suatu negara. Menurut mereka hal ini tentu saja hanya akan dapat direalisasikan jika membebaskan masyarakat bekerja sebebaskan-bebasnya untuk memproduksi sesuai dengan faktor-faktor produksinya masing-masing dan mengumpulkan kekayaan tersebut.

Pandangan inilah sejalan dengan yang Braun, B. (2016) sebut dengan Politik Ekonomi (Political Economy) atau Ekonomi Kapitalis. Pandangan ini jelas keliru dan bertentangan dengan realitas, serta tidak pernah menyebabkan naiknya taraf kehidupan individu secara menyeluruh. Begitu pula, tidak pernah menghasilkan kemakmuran bagi setiap individu masyarakat. Fakta ini terlihat bahwa negara-negara Barat yang telah termasuk ke dalam negara-negara kaya sekalipun masih banyak dijumpai orang-orang miskin dengan perkampungan kumuhnya dan para pengemis serta gelandangan yang selalu terlihat di sudut-sudut kota.

Kesalahan pandangan mereka tersebut terletak pada kesalahan mereka dalam memandang kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah kebutuhan masing-masing individu khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok mereka. Bukan kebutuhan-kebutuhan segenap manusia, umat ataupun bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu problematika ekonomi itu akan muncul di tengah masyarakat jika ada individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Bukan karena seluruh kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Sebab selama kebutuhan pokok setiap individu masyarakat terpenuhi meskipun kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) belum atau bahkan tidak terpenuhi, maka masyarakat tersebut tidaklah mengalami kesulitan yang berarti dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya meskipun suatu negara telah tergolong sebagai negara kaya, namun masih ada individu masyarakatnya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, maka sebenarnya problematika ekonomi tetap akan selalu dihadapi oleh negara tersebut.

Dengan demikian masalah ekonomi yang sebenarnya adalah bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat kepada setiap individu, yaitu pendistribusian barang dan jasa kepada individu masyarakat, bukan bertumpu pada kebutuhan-kebutuhan yang dituntut oleh umat atau bangsa secara total, tanpa melihat masing-masing individunya. Oleh karena

itu pondasi ekonomi yang harus dibuat adalah kebijakan yang dapat menjamin distribusi kekayaan negara baik kekayaan di dalam maupun di luar negeri kepada seluruh anggota masyarakat, baik dari segi tejaminnya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok semua anggota masyarakat dan memuaskan mereka. Di samping adanya jaminan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier mereka.

2) Kritik Tentang Konsep Nilai (Value)

Pandangan para ahli ekonomi Kapitalis yang menyatakan bahwa nilai guna (value in use) suatu barang dan jasa sangat tergantung dengan masing-masing individu dan bersifat sangat subyektif, telah membawa konsekuensi bahwa sistem ekonomi kapitalis menganggap nilai barang dan jasa sebagai sesuatu yang nisbi (relatif), bukan hakiki, sebab menurut mereka penilaian terhadap barang dan jasa sangat ditentukan oleh pandangan setiap orang terhadap tingkat kepuasan yang dapat dia rasakan ketika dia mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Dan tingkat kepuasan yang dapat dia rasakan tersebut sangat tergantung dengan harga barang dan jasa tersebut.

Pandangan yang demikian adalah pandangan yang keliru. Didukung pendapat Desai, R. (2020) nilai suatu barang dan jasa sebenarnya semata-mata ditentukan oleh manfaat dan kegunaannya dengan memperhatikan faktor kelangkaannya. Sehingga pandangan yang hakiki terhadap nilai barang dan jasa apapun, adalah pandangan terhadap manfaat barang dan jasa tersebut dengan memperhatikan faktor kelangkaannya. Oleh karena itu, nilai hakikatnya adalah sesuatu yang pasti (hakiki) dan bukan sesuatu yang relatif (nisbi). Jadi nilai itu adalah sesuatu yang memiliki fakta yang dapat dijangkau, bukan merupakan sesuatu yang nisbi (relatif). Karena itu pandangan para ahli ekonomi kapitalis terhadap nilai adalah pandangan yang salah dari dasarnya.

Sedangkan apa yang mereka sebut dengan teori kepuasan marjinal (marginal utility theow), sebenarnya pembahasannya tidak berkaitan dengan konsep "nilai" barang dan jasa tetapi berkaitan dengan konsep "harga". Karena "nilai" barang dan jasa sebenarnya ditentukan oleh perkiraan manfaat barang tersebut dengan memperhatikan faktor kelangkaannya pada saat tertentu. Karena itu naiknya harga suatu barang tidaklah berarti bahwa "nilai" meningkat dan sebaliknya turunnya harga barang tidak berarti "nilainya" juga menurun. Sebab nilai suatu barang dari segi manfaatnya tidak berpengaruh dengan harganya.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara harga dengan nilai, termasuk menurut para ahli ekonomi kapitalis sekalipun. Di mana harga perkiraannya ditentukan oleh adanya interaksi antara permintaan dan penawaran. Sedangkan nilai perkiraannya ditentukan oleh manfaat yang terdapat pada barang dan jasa ketika diukur manfaatnya dengan memperhatikan faktor kelangkaannya. Dengan demikian pembahasan tentang nilai dilihat dari segi dasarnya adalah keliru. Sehingga pembahasan yang dibangun dengan dasar yang salah tersebut keliru pula.

Namun apabila nilai tersebut manfaatnya diperkirakan dengan kegunaan barang dan jasa tertentu, maka hal itu merupakan perkiraan yang tepat. Dimana perkiraan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih tepat meskipun dalam jangka pendek. Sedangkan apabila nilai tersebut kegunaannya diukur atau diperkirakan dengan harga, maka hal itu merupakan perkiraan yang bersifat dugaan, bukan hakiki lagi. Pada saat itu nilai akan berubah-ubah setiap saat mengikuti kecenderungan pasar. Dan pada saat itu keberadaannya sebagai nilai akan gugur, sehingga realitas nilai tersebut tidak layak lagi disebut dengan "nilai" (value), melainkan telah berubah menjadi alat yang di dalamnya terdapat nilai uang yang mengikuti kecenderungan pasar, bukan mengikuti manfaat yang ada di dalamnya.

Oleh karena itu ketika harga ditetapkan sebagai satu-satunya "nilai tukar", maka secara pasti harga tersebut merupakan standar (tolok ukur) bagi barang dan jasa apakah barang dan jasa tersebut berguna (utility) atau tidak (disutility). Bahkan harga tersebut merupakan standar (tolok ukur) bagi tingkat kegunaan suatu barang apakah tinggi atau rendah. Oleh karena itu suatu barang dan jasa dinilai memiliki kegunaan dan produktivitas tertentu, ketika masyarakat menentukan barang dan jasa tertentu itu mempunyai harga tertentu. Adapun tingkat kegunaannya, diukur dengan tingkat harga yang diterima oleh konsumen dari produsen pada saat terjadi transaksi jual beli. Sehingga barang dan jasa yang memiliki tingkat kegunaan yang lebih besar akan dinilai dengan harga yang lebih besar pula. Baik barang dan jasa tersebut merupakan barang pertanian ataupun industri, jasa layanan pedagang, layanan jasa biro angkutan, dokter, insinyur dan lain-lain.

Selain itu menjadikan harga sebagai satu-satunya nilai tukar barang dan jasa adalah keliru. Karena itu sesungguhnya ada perbedaan antara "nilai tukar" dengan harga. Di mana "nilai tukar" (value in exchange) adalah penisbatan pertukaran barang dan jasa dengan barang dan jasa lainnya secara mutlak. Sedangkan "harga" adalah "nilai tukar" barang dan jasa dengan uang. Sehingga harga sebenarnya tidak secara pasti menggambarkan nilai tukar barang dan jasa yang sebenarnya.

Hal ini membawa konsekuensi, bahwa seluruh harga barang dan jasa bisa jadi akan meningkat tinggi pada saat yang bersamaan (mengalami inflasi), kemudian pada saat yang lain secara bersamaan bisa mengalami penurunan (mengalami deflasi) meskipun sebenarnya "nilai tukarnya" tidak berubah. Oleh karena itu, sebenarnya harga barang dan jasa hanyalah merupakan salah satu dari "nilai tukar" (value in exchange) suatu barang dan jasa.

3) Kritik Harga dan Peranannya dalam Produksi, Konsumsi, dan Distribusi

Pendapat ahli ekonomi kapitalis yang menyatakan bahwa hargalah satu-satunya yang mendorong laju produksi suatu negara. Naiknya harga-harga di pasar barang (produk) akan mendorong para produsen untuk menawarkan lebih banyak produknya. Untuk itu produsen perlu meningkatkan produksinya. Sementara itu produksi tidak dapat ditingkatkan kecuali merekrut tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Di Sisi lain para pekerja hanya akan menawarkan lebih banyak jasa tenaganya jika upah yang mereka dapatkan lebih tinggi. Kondisi ini akan berlaku sebaliknya. Oleh karena itu menurut para ahli ekonomi kapitalis yang mendorong manusia untuk mencurahkan jerih payahnya untuk memproduksi adalah imbalan yang bersifat materi (harga).

Pandangan itu adalah pandangan tidak tepat dan bertentangan dengan fakta. Sebab tidak sedikit usaha yang telah dikeluarkan manusia tidaklah semata-mata untuk mendapatkan imbalan berupa materi (harga). Ada orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya moral (pujian) yang bahkan tidak jarang dia bahkan harus mengeluarkan materi dan tidak mendapatkan materi apa-apa. Misalnya ada seseorang membuat makanan untuk dibagikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma. Ada juga usaha memenuhi kebutuhan yang sifatnya spiritual seperti ibadah. Sehingga sering kita temui manusia terkadang mengorbankan sejumlah hartanya untuk memenuhi kebutuhan spiritual, atau kebutuhan moral yang jumlah lebih besar dari yang dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan materinya.

Karena itu harga bukan satu-satunya yang bisa mendorong laju produksi. Kadangkala produksi dapat ditingkatkan dengan harga, dan kadangkala oleh yang lain. Seringkali kita saksikan seseorang yang bekerja berbulan-bulan hanya untuk mendirikan sebuah masjid tanpa mengharapkan upah sedikitpun. Seringkali juga kita jumpai pengusaha yang memproduksi barang tertentu agar dapat dibagikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang memerlukan. Seringkali juga kita saksikan suatu

umat atau bangsa yang bekerja keras membangun benteng persenjataan demi untuk mempertahankan tanah airnya tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Dan semua kegiatan dicontohkan di atas tidaklah sama sekali didorong oleh harga. Karena itu menjadikan harga sebagai satu-satunya faktor yang mendorong laju produksi adalah tidak benar. Pendapat ahli ekonomi kapitalis yang juga menganggap bahwa hargalah yang menjadi pengatur konsumsi dan distribusi di tengah masyarakat adalah tidak tepat. Jika hanya harga yang mengatur konsumsi, maka siapa saja yang tidak mampu membayar "harga" tertentu berarti tidak dapat mengkonsumsi barang dan jasa atau dengan kata lain dia tidak layak untuk hidup.

Adapun harga sebagai penentu konsumsi dan distribusi. Menurut Maniatis, P. (2016) jumlah barang yang terdistribusi ke konsumen menunjukkan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Padahal faktanya jumlah yang terdistribusi itu belum tentu menunjukkan jumlah kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Misalnya, kebutuhan sebenarnya yang layak sebuah keluarga terhadap beras 60 kg/ bulan, tetapi karena harganya mahal sehingga tidak mampu membeli sebanyak itu, mereka hanya mengkonsumsi sebanyak 45 kg/ bulan. Artinya, jumlah yang terdistribusi ke keluarga itu hanya 45 kg padahal kebutuhan yang sebenarnya 60 kg. Jadi harga itulah yang menyebabkan berkurangnya kebutuhan normal/ layak. Konsumen yang kurang mampu akan tetap berada pada ketidakmampuannya kecuali kalau harga itu turun atau mereka harus mencari pendapatan yang lebih besar.

Konsep seperti ini akan sangat berpengaruh kepada kehidupan segolongan orang yang tidak mampu mengkonsumsi jumlah barang yang dibutuhkan, terlebih lagi jika kebutuhan tersebut adalah kebutuhan primernya. ini lebih diperparah jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul. Pada akhirnya jumlah anggota masyarakat yang kekurangan (miskin) akan semakin besar seiring berkembangnya kebutuhan mereka.

Di samping itu dengan menjadikan harga sebagai satu-satunya faktor yang berperan, dalam konsumsi dan distribusi, telah mengakibatkan hanya orang-orang yang memiliki harta untuk membayar harga barang dan jasa yang layak dan mampu hidup. Dan ini tentu saja mengabaikan orang-orang yang lemah, cacat, jompo dan orang-orang yang tidak mampu bekerja. Atau dengan kata lain hanya orang-orang yang mampu membayar harga barang dan jasa saja yang layak hidup sedangkan yang lainnya tidak layak hidup.

D. Pandangan Islam Terhadap Sistem Ekonomi Sosialis

Islam mendasarkan kegiatan ekonomi pada prinsip persamaan kedudukan, prinsip keadilan, tuntutan sosial yang secara jelas, prinsip pertimbangan antara hak dan kewajiban, serta tuntunan hidup tolong menolong, memungkinkan dikurangnya penderitaan kaum lemah dalam menghadapi guncangan (krisis) ekonomi (Hidayat, S. 2014). Dengan mengembangkan sikap kebersamaan dalam menikmati keuntungan dan menanggung kerugian pada berbagai kegiatan ekonomi, baik dalam fungsinya sebagai produsen, distributor maupun konsumen, maka keserasian hubungan antara unit-unit ekonomi dalam masyarakat dapat dijamin.

Pandangan islam terhadap sistem ekonomi sosialisme yang berfokus pada perbaikan segalanya dari pada kemajuan beberapa individu karena alat produksi dimiliki secara kolektif oleh rakyat dan negara di mana setiap orang bekerja dan gajarnya didistribusikan kepada semua orang oleh pemerintah. Dengan demikian, tidak ada sistem pasar bebas yang akan ada dan semua orang menjadi Proletar (pencari nafkah - kelas ekonomi dan sosial yang terdiri dari pekerja industri yang memperoleh pendapatan semata-mata dari kerja mereka) dengan berakhirnya borjuasi secara otomatis tanpa Eksploitasi atau Kelas Tereksplotasi dan akan mengakhiri Konflik Kelas. Karena semua sumber daya disediakan oleh pemerintah,

orang yang berpenghasilan lebih banyak mungkin harus membayar pajak yang lebih tinggi dan mungkin merasa tidak puas. Akhirnya, akan tiba saatnya masyarakat komunis atau sosialis akan mengambil alih kapitalisme.

Sistem ekonomi sosialis tanpa pengawasan moral, perilaku ekonomi cenderung mengarah kepada kerusakan dan kerugian yang dirasakan masyarakat umum (Ghozali, M., Sarjana, S. A., & Arif, A. 2019). Munculnya praktek monopoli, eksploitasi sumber daya alam tanpa batas, praktek riba dan lain sebagainya, adalah sebagian contoh dari dampak negatif yang diakibatkan ghaibnya moral dan spiritual dalam aktifitas ekonomi.

Dalam paham sistem ekonomi sosialisme, ketimpangan ekonomi yang lebar merupakan akibat dari kebebasan kepemilikan alat industri. Sistem sosialisme berpandangan bahwa negara yang harus menguasai sektor industri, maka dianjurkan penghapusan kepemilikan alat faktor industri bagi individu maupun swasta. Negaralah yang harus berperan mengatur produksi, harga, distribusi, dan pengupahan buruh dari semua sector industri yang kemudian akan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sementara dalam sistem ekonomi sosialis sebelumnya tidak menghendaki kepemilikan individu maupun swasta dalam kepemilikan alat faktor produksi. Namun dalam Islam hukum asal dari kepemilikan alat faktor produksi bagi individu dan swasta tersebut adalah mubah (jaiz). Semua harta benda yang ada sesungguhnya boleh dimiliki, selama tidak ada dalil mengharamkannya. Keunggulan dari diterapkannya sistem ini adalah diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi melalui adanya kebolehan bagi individu maupun swasta untuk memiliki alat-alat industri, maka motivasi berproduksi dapat terus terjaga dan ditingkatkan. Adapun dalam Islam jenis kepemilikan alat-alat produksi adalah industri yang memproduksi barang yang haram dan industri yang menghasilkan kepemilikan umum.

Untuk penentuan upahnya sosialisme berpandangan bahwa kerja dari seorang pekerja merupakan asas yang paling utama. Sementara pandangan sistem ekonomi Islam, upah yang adil adalah harus melihat unsur-unsur lain yang berkaitan dengan penggunaan tenaga manusia, berbeda dalam sistem ekonomi sosialis yang berpendapat bahwa bahwa penentuan upah yang utama ditentukan pada kerja dari seorang pekerja itu sendiri. Unsur lain itu diantaranya, peran dari bahan baku lain, peran dari besar kecilnya modal yang diberikan, peran dari banyak atau sedikitnya energy yang digunakan, demikian juga peran dari ada atau tidaknya pekerja lain untuk menghasilkan bahan baku pendukung yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Pada kenyataannya tanpa sentuhan kerja dari pekerja itu sudah memiliki nilai yang tinggi.

Menurut Fasa, M. I. (2017) secara sistem ekonomi sosialis terletak pada empat aspek sebagai berikut:

1. Pandangan islam dari sisi motif dan tujuan

Pandangan Islam dalam setiap perilaku ekonomi adalah perwujudan ibadah kepada Allah SWT, di samping untuk memenuhi kebutuhan materi. Setiap Muslim berkewajiban untuk memenuhi kesejahteraan jasmani dan ruhaninya, serta mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat (falah). Berbeda dengan ekonomi sosialis yang hanya menekankan pemenuhan kecukupan materi semaksimal mungkin, tanpa memperhatikan aspek ruhani. Seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditundukkan (disediakan) untuk melayani kepentingan manusia.

2. Pandangan islam dari sisi moral dan etika

Sistem ekonomi sosialis dibangun atas dasar pemisahan agama dan nilai-nilai moral dari aktifitas ekonomi. Menurut mereka, agama adalah untuk Allah, dan Negara untuk semua penduduk. Hal ini jelas bertolak belakang dengan Islam, yang menekankan pentingnya keberadaan moral dan etika yang bersumber dari teks-teks agama, untuk mendasari setiap

gerak-gerak manusia. Fikri, Y. T. A. (2018) menyebutkan beberapa variable moral dalam berkonsumsi di antaranya konsumsi berdasarkan kebutuhan barang-barang yang baik dan halal, berhemat, tidak bermewah-mewah menjauhi hutang, menjauhi kekikiran. Hal ini jelas berlawanan dengan konsep konsumsi dalam sistem ekonomi sosialis yang mengedepankan kepuasan maksimal berdasarkan pendapatan yang diperoleh.

3. Pandangan islam dari dari sisi sumber hukum dan referensi

Dalam sistem ekonomi sosialis hukum-hukum dan prinsip-prinsipnya merupakan hasil dari pengamatan dan riset para pakarnya, yang seringkali dipengaruhi oleh ideology tertentu. Sehingga, seringkali terdapat pertentangan antara satu ide dengan lainnya bahkan tidak jarang mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi yang mengelilinginya

4. Pandangan islam dari sisi criteria dan sistem pasar

Dalam sistem ekonomi sosialis yang dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya terbatas. Upaya ini didukung oleh kebebasan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan. Pemahaman ini muncul atas dasar filosofi Adam Smith bahwa terselenggaranya keseimbangan pasar dikarenakan manusia yang mementikan diri sendiri. Sehingga semua pelaku ekonomi sosialis senantiasa mengejar keuntungan tanpa batas dengan cara bersaing, dan kalau perlu saling mematikan (*free fight competition*). Pedoman pokok dan motto yang mereka pegang teguh adalah *Laissez Faire*. Sebaliknya, pasar dalam ekonomi sosialis, tidak ada kebebasan di dalamnya. Setiap perkara harus tunduk kepada pemerintah. Baik biaya produksi, harga barang, ataupun jenis barang semuanya telah diatur oleh penguasa (Desai, R. 2020). Rakyat hanyalah alat untuk memenuhi kesejahteraan Negara secara umum.

Latihan Soal

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Bagaiman rancang bangun pemikiran sistem ekonomi sosialis?
2. Bagaimana sosialisme mengkritik konsep kelangkaan?
3. Bagaimana sosialisme mengkritik teori nilai yang dikemukakan sistem ekonomi kapitalis?
4. Bagaimana Islam mengkritik teori yang dikemukakan sistem sosialis?
5. Bagaimana rancang bangun Islam dalam ekonomi berkeadilan?

GLOSARIUM

Equality adalah berkaitan dengan tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama.

Eksplorasi bermakna menjelajahi sebuah wilayah atau tempat baru yang belum dikenal untuk mempelajari apapun yang ada di dalamnya.

Filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup

Kolektif adalah perilaku yang dilakukan sekelompok orang secara bersama-sama sebagai tanggapan spontan terhadap rangsangan tertentu

Kontradiksi adalah berkaitan dengan pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan.

Marxisme adalah sistem ekonomi dan sosial yang didasarkan pada teori-teori politik dan ekonomi.

Mazhab adalah jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh seorang dalam menetapkan suatu pemikiran.

Mekanisme adalah Berkaitan dengan pandangan bahwa interaksi dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.

Ideologi adalah sebuah pemikiran yang mempunyai ide berupa konsepsi rasional yang meliputi akidah dan solusi atas seluruh problem kehidupan manusia.

Revolusioner adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat.

Surplus adalah istilah yang digunakan apabila jumlah pemasukan lebih besar ketimbang pengeluaran

Proletar adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi kelas sosial rendah